

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Rabu, 06 Maret 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Media Indonesia (halaman 18)	Rabu, 06 Maret 2019	Proyek Stadion Mangkrak	Proyek rehabilitasi Stadion Olahraga Oepoi di Kelurahan Oepoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengkrak dan merugikan negara Rp600 juta. Kerugian ini berasal dari denda keterlambatan dan denda uang muka. Proyek tersebut dimulai Agustus 2017 dengan anggaran APBN NTT sebesar Rp6,3 miliar. Sampai proyek berakhir Desember 2017, baru mencapai 18%.
2	Kompas (halaman Utama)	Rabu, 06 Maret 2019	Pembenahan DAS Jeneberang Bisa Tiru Citarum	Dibutuhkan peraturan presiden agar penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan dalam berjalan efektif dan efisien seperti yang diterapkan pada sungai Citarum. Selama penataan Kawasan DAS Jeneberang berjalan secara sectoral, permasalahan lingkungan di Kawasan tersebut diyakini sulit.
3	Kompas (halaman 17)	Rabu, 06 Maret 2019	30 Jembatan Ruas Wamena-Mamugu Mulai Dibangun	Pembangunan 30 jembatan yang menghubungkan jalan Trans-Papua dari Wamena ke Mamugu dimulai bulan ini. Sebanyak 600 anggota TNI AD dikerahkan secara bertahap untuk membangun jembatan itu.
4	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 06 Maret 2019	Ruas Bagian Pemerintah Tersendat	Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan, karena masih menunggu pinjaman dari China. Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Max Antameng mengatakan bahwa pengerjaan jalan tol sepanjang 84 kilometer dibagi menjadi dua bagian.
5	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Rabu, 06 Maret 2019	Jejak Perdana Swasta di Tanah Celebes	Pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi segmen Makassar-Parepare sepanjang 13,90 kilometer yang merupakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha rencananya dibangun bulan depan. Sebagai pemenang lelang setelah menyisihkan dua konsesium pesaingnya. Konsesium PT Pembangunan Perumahan Tbk. Kini berancang-ancang membangun proyek kereta api pertama yang dibangun swasta di tanah Celebes.
6	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Rabu, 06 Maret 2019	Sirkuit Balap Motor Perlu Waktu Panjang	Rencana pembangunan sirkuit jalan raya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC bekerja sama dengan Vinci Construction Grand Projects masih menjadi euphoria untuk meningkatkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok.
7	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Rabu, 06 Maret 2019	Bandung Minta Rp256 Miliar	Pemerintah Kota Bandung meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi anggaran untuk pembangunan Sembilan infrastruktur di Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana optimis, usulan kebutuhan infrastruktur itu akan terealisasi mengingat nilai permohonan anggaran Kota Bandung relative lebih kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat dengan total pengajuan anggaran Rp256,14 miliar
8	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Rabu, 06 Maret 2019	Perusda MBS Jadi Operator Pelaksana	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan akan diresmikan pada 14 Maret 2019 dan operator pelaksanaan akan diserahkan kepada perusahaan daerah, PT Melati Bhaki Satya atau MBS.
9	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Rabu, 06 Maret 2019	PUPR, Pisah atau Tetap Digabung?	Wacana penggabungan atau pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini berembus semakin kencang, termasuk di kedua kubu calon presiden dan wakil presiden. Dan kedua calon tersebut siap menelurkan strategis khusus seandainya terpilih mengemban amanat rakyat dalam 5 tahun pemerintah.

Judul	Proyek Stadion Mangkrak	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Media Indonesia (halaman 18)		
Resume	Proyek rehabilitasi Stadion Olahraga Oepoi di Kelurahan Oepoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mangkrak dan merugikan negara Rp600 juta. Kerugian ini berasal dari denda keterlambatan dan denda uang muka. Proyek tersebut dimulai Agustus 2017 dengan anggaran APBN NTT sebesar Rp6,3 miliar. Sampai proyek berakhir Desember 2017, baru mencapai 18%.		

Proyek Stadion Mangkrak

Pembangunan Jembatan Musi 6 di Palembang juga mangkrak, dan baru mencapai 68%. Penyebabnya ialah pembebasan lahan yang berlangsung alot.

PALCE AMALO

palce@mediaindonesia.com

PROYEK rehabilitasi Stadion Olahraga Oepoi di Kelurahan Oepoi, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), mangkrak dan merugikan negara Rp600 juta.

Kerugian itu berasal dari denda keterlambatan dan denda uang muka. Proyek tersebut dimulai Agustus 2017 dengan anggaran APBD NTT sebesar Rp6,3 miliar. Sampai proyek berakhir Desember 2017, baru mencapai 18%.

Proyek itu pun diperpanjang selama 50 hari dan berakhir 16 Februari 2018. Namun, progres proyek hanya mencapai 52,28%. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan NTT, sebelumnya progres rehabilitasi gedung tersebut hanya 40%.

"Sebagai pejabat pembuat komitmen, tugas saya ialah kalau pekerjaan tidak bisa dilanjutkan, dilakukan perpanjangan waktu, dan terakhir pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Rehabilitasi Stadion Olahraga Oepoi, Dinas Pemuda dan Olahraga NTT, Niko Ratulangi, kemarin.

Niko menyebutkan selama proyek tersebut berlangsung, tidak hanya dikerjakan perusahaan pemenang tender, muncul juga sejumlah pengusaha. Pengusaha yang ikut

terlibat dalam proyek itu ialah Guido Kenenbudi dan Charles Paulus Bakker.

Pada kesempatan sama Charles mengakui bahwa ia diminta Guido melanjutkan pekerjaan proyek itu karena progres baru 18% sampai Desember 2018. Ia menyanggapi dengan penetapan oleh notaris sebagai salah satu *supplier* yang memegang keseluruhan proyek.

"Jembatan sudah jadi. Sayangnya jalan untuk naik dan turunnya kendaraan melewati jembatan belum ada."

Dharma Budi

Kepala PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Selatan

Ketika sisa pekerjaan rehabilitasi stadion dengan anggaran Rp4,5 miliar tengah dikerjakan, masa perpanjangan waktu yang diberikan PPK sudah habis.

Kasus mangkrak juga terjadi pada pembangunan Jembatan Musi 6 di Palembang, Sumatra Selatan. Secara keseluruhan, persentase proyek jembatan tersebut mencapai 68%. Bahkan jembatan itu sudah diaspal dan dipercantik

dengan ornamen dan lampu. Namun, sisa pekerjaan berupa jalan di bagian hulu dan hilir jembatan belum dikerjakan karena pembebasan lahan belum selesai.

"Jembatan sudah jadi. Sayangnya jalan untuk naik dan turunnya kendaraan melewati jembatan belum ada. Ini karena pembebasan lahan belum selesai," kata Kepala PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatra Selatan, Dharma Budi.

Tahun ini tidak ada pengerjaan jembatan karena sudah ada kepastian bahwa pembebasan lahan belum selesai.

Dharma memaparkan ada lima rumah di sebelah hulu dan hilir yang para pemiliknya menolak besaran ganti rugi. Dengan adanya kendala tersebut, pihaknya memutuskan untuk mengalihkan dana ke pembangunan infrastruktur lain.

Diambil alih

Masih terkait infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akhirnya mengambil alih perbaikan jalan rusak di Ogan Komering Ulu setelah sempat viral di media sosial.

Direktur Preservasi Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Atianto Busono didampingi Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Ki Agus Syaiful Anwar langsung meninjau lokasi di Jalan Batumarta yang rusak parah, Senin (4/3). "Kami ingin membantu, paling tidak bisa fungsional. Ini instruksi dari Presiden," kata Atianto.

Kementerian PU-Pera akan membantu perbaikan selama sebulan. (DW/N-2)

Judul	Pembenahan DAS Jeneberang Bisa Tiru Citarum	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Kompas (halaman Utama)		
Resume	Dibutuhkan peraturan presiden agar penataan Kawasan Daerah Aliran Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan dalam berjalan efektif dan efisien seperti yang diterapkan pada sungai Citarum. Selama penataan Kawasan DAS Jeneberang berjalan secara sektoral, permasalahan lingkungan di Kawasan tersebut diyakini sulit.		

LINGKUNGAN HIDUP

Pembenahan DAS Jeneberang Bisa Tiru Citarum

MAKASSAR, KOMPAS — Dibutuhkan peraturan presiden agar penataan kawasan Daerah Aliran Sungai Jeneberang di Sulawesi Selatan dapat berjalan efektif dan efisien seperti yang diterapkan pada Sungai Citarum. Selama penataan kawasan DAS Jeneberang berjalan secara sektoral, permasalahan lingkungan di kawasan tersebut diyakini sulit.

Kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah daerah juga mendukung agar peraturan presiden (perpres) itu dapat segera diterbitkan. Perpres tersebut

dinilai dapat membangun sinergi enam instansi yang selama ini menjadi pemangku kepentingan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang.

Hingga saat ini, instansi-instansi tersebut bergerak sendiri-sendiri dalam mengatasi masalah lingkungan di DAS Jeneberang. Keenam instansi itu adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang yang berada di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Konservasi

Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulsel yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kabupaten Gowa, Pemkab Takalar, dan Pemerintah Kota Makassar.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin Adi Maulana saat ditemui di Kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, awal Februari 2019, mengatakan, harus ada payung hukum yang tinggi berupa perpres untuk mengatur pemma, kementerian,

dan lembaga setingkat kementerian.

"Selama ini, pendekatannya hanya proyek sesuai tugas pokok dan fungsi instansi terkait. Masih sektoral dan belum holistik. Ini membuat kondisi DAS terus memburuk. Perlu pembenahan secara sinergis," ujar Adi.

Dengan adanya perpres, pembenahan akan dikepalai langsung oleh gubernur sehingga memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan antarinstansi, mulai dari BBWS, BKSDA, Pemkab, bahkan TNI dan Polri. Perpres juga diha-

rapkan mendorong kejelasan anggaran dan alokasinya sehingga mempercepat pembenahan DAS. Tak hanya itu, perpres juga bisa mengatur sanksi bagi instansi terkait yang dianggap tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam pembenahan DAS.

Mencontoh Citarum

Adi menilai, pembenahan DAS Jeneberang bisa meniru pembenahan Sungai Citarum yang juga menggunakan perpres sebagai payung hukum.

(Bersambung ke him 11 kol 1-5)

Pembenahan DAS Jeneberang Bisa Tiru Citarum

(Sambungan dari halaman 1)

Ia menilai langkah itu cukup berhasil membenahi sungai terbesar di Jawa Barat tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amien mengatakan, sebetulnya Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang mengatur soal pengelolaan DAS, yakni di Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Namun, peraturan itu tidak diimplementasikan secara nyata di lapangan.

"Kalau ada perpres, berarti ada perintah langsung dari presiden. Maka, gubernur, bupati, dan kementerian terkait tidak bisa lagi mengelak," kata Al Amien.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengatakan, Pemprov Sulsel akan terlebih dahulu mencoba membenahi

DAS Jeneberang dengan mengeluarkan peraturan daerah. Namun, dia sangat mendukung jika perpres diterbitkan dengan gubernur sebagai ketua pelaksana. Melalui perda tersebut, Nurdin membentuk tim yang berisi berbagai pemangku kepentingan.

Nurdin mengaku sudah berbicara dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo untuk membahas ke-

ungkinan dilakukan pembenahan DAS Jeneberang seperti halnya di Sungai Citarum.

Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan mengusulkan pembentukan satuan tugas yang diisi oleh instansi yang berfungsi khusus menindak pelanggaran di DAS Jeneberang. Selama ini, Adnan mengaku kewalahan untuk menindak pelanggaran hukum yang terjadi di area DAS Jeneberang, seperti penambangan pasir dan batu ilegal.

Perhutanan sosial

Kepala Dinas Kehutanan Sulsel Muhammad Tamzil mengatakan, skema perhutanan sosial yang digaungkan pemerintah pusat dapat dipakai oleh masyarakat setempat di kawasan hutan lindung.

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mendulang manfaat ekonomi, tetapi tidak menghilangkan fungsi ekologis.

(ILO/BKY/DIM/REN)

Judul	30 Jembatan Ruas Wamena-Mamugu Mulai Dibangun	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Kompas (halaman 17)		
Resume	Pembangunan 30 jembatan yang menghubungkan jalan Trans-Papua dari Wamena ke Mamugu dimulai bulan ini. Sebanyak 600 anggota TNI AD dikerahkan secara bertahap untuk membangun jembatan itu.		

TRANS-PAPUA

30 Jembatan Ruas Wamena–Mamugu Mulai Dibangun

JAYAPURA, KOMPAS — Pembangunan 30 jembatan yang menghubungkan jalan Trans-Papua dari Wamena ke Mamugu dimulai bulan ini. Sebanyak 600 anggota TNI AD dikerahkan secara bertahap untuk membangun jembatan itu.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Papua Osman Marbun saat dihubungi dari Jayapura, Selasa (5/3/2019), mengatakan, 600 anggota TNI berasal dari Batalyon Zeni Tempur 8/Sakti Mandra Guna dan Batalyon Infanteri Para Raider 431 Kostrad dikirim ke Papua secara ber-

tahap sejak Senin (4/3). Kedua satuan ini dari Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin, Sulawesi Selatan. Pembangunan jembatan itu di bawah pengawasan tenaga ahli dari dua badan usaha milik negara, yakni PT Istaka Karya dan PT Brantas Abipraya.

Jalan Trans-Papua ruas Wamena-Mamugu terletak di wilayah tiga kabupaten, yakni Asmat, Nduga, dan Jayawijaya. Pembangunan 30 jembatan ini akan menghubungkan jalan dari Mamugu ke Wamena sepanjang 284,30 kilometer.

Menurut rencana, jalan trans

ini menjadi pusat distribusi barang kebutuhan pokok dan material untuk proyek infrastruktur ke seluruh kabupaten di kawasan pegunungan tengah Papua. Kabupaten yang akan mendapatkan dampak dari kehadiran jalan tersebut, antara lain, Nduga, Lanny Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Yalimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, dan Tolikara.

TNI turut dikerahkan dalam pembangunan jalan trans ini karena di sejumlah lokasi masih rawan gangguan keamanan. Seperti diketahui, kelompok Egi-anus Kogoya menyerang 28 pe-

kerja Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, 2 Desember 2018. Total 17 orang meninggal, 7 orang selamat, dan 4 orang belum ditemukan. Sebelum insiden itu, pembangunan jembatan baru selesai 5 unit dari total 35 unit di jalan Trans-Papua dari Wamena-Mamugu.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, selain 600 anggota TNI yang mengerjakan jembatan di titik rawan, sekitar 200 tentara juga dikerahkan untuk pengamanan proyek tersebut. (FLO)

Judul	Ruas Bagian Pemerintah Tersendat	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan, karena masih menunggu pinjaman dari China. Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Max Antameng mengatakan bahwa pengerjaan jalan tol sepanjang 84 kilometer dibagi menjadi dua bagian.		

► TOL SERANG-PANIMBANG

Ruas Bagian Pemerintah Tersendat

Bisnis, JAKARTA — Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang yang menjadi tanggung jawab pemerintah belum memperlihatkan kemajuan yang signifikan, karena masih menunggu pinjaman dari China.

Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Max Antameng mengatakan bahwa pengerjaan jalan tol sepanjang 84 kilometer dibagi menjadi dua bagian.

Badan usaha jalan tol (BUJT) yakni PT Wijaya Karya Serang Panimbang akan membangun 51 kilometer dan pemerintah 33 kilometer. Progres ruas yang akan dibangun oleh pemerintah saat ini masih dalam tahap persiapan.

"Saat ini yang sedang dilakukan pembangunan adalah dari pihak BUIT, sedangkan porsi pemerintah yang dibiayai oleh loan China masih dalam tahap persiapan, belum sampai pada tahap transaksi [tender kontraktor]," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (5/3).

Padahal, menurut Max, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan kontrak pembangunan jalan tol tersebut bisa ditandatangani pada pertengahan tahun ini, tetapi dalam kenyataannya mundur dari perkiraan.

"Posisi sekarang sih sudah mundur, kan tadinya mau mempergunakan model *availability payment*, tetapi berubah jadi loan China," katanya.

Pinjaman dari China merupakan sumber baru dalam pembiayaan jalan tol Serang—Panimbang porsi pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian PUPR berniat menggunakan anggaran negara dengan skema ketersediaan layanan atau *availability payment* (AP).

Berdasarkan data KPPIP per 21 Februari 2019, progres pembebasan lahan oleh BUIT telah mencapai 54%, sedangkan progres konstruksi 14%.

Pembangunan jalan tol Serang—Panimbang terbagi dalam tiga seksi, yaitu seksi 1 Serang—Rangkasbitung (26,50 kilometer), seksi 2 Rangkasbitung—Bojong (33 kilometer/bagian pemerintah), dan seksi 3 Bojong—Panimbang (24,41 kilometer).

Adapun, proyek jalan tol Serang—Panimbang dibangun oleh PT Wijaya Karya Serang Panimbang. Proyek yang dibangun oleh anak usaha PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) itu memiliki nilai investasi Rp5,33 triliun.

WIKA menjadi pemegang saham terbesar pada perusahaan tol ini dengan memegang 80% saham, diikuti oleh PT Pembangunan Perumahan Tbk. 15%, dan PT Jababeka Infrastruktur 5%.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan bahwa perusahaan siap melakukan divestasi ruas tol tersebut.

Sejumlah pihak, katanya, telah menyatakan ketertarikan untuk mengambil alih saham perseroan di PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

Divestasi merupakan bagian dari strategi perseroan dalam mengelola portofolio di jalan tol. Dana hasil divestasi, lanjut Tumiyana, akan digunakan untuk moda ekspansi ke portofolio yang baru.

BUMN karya itu fokus melakukan percepatan konstruksi untuk seksi 1 (Serang—Rangkas Bitung) sepanjang 26,50 km dan mempercepat pembebasan lahan seksi 3 (Bojong—Panimbang) sepanjang 24,40 km untuk mengejar target penyelesaian proyek pada akhir 2019.

Selain di Serang—Panimbang, WIKA juga berniat melepas 20% sahamnya di PT Jasaraga Surabaya Mojokerto. BUIT yang memegang konsesi tol Surabaya—Mojokerto. *(Rizka R. Kianti)*

Judul	Jejak Perdana Swasta di Tanah Celebes	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi segmen Makassar-Parepare sepanjang 13,90 kilometer yang merupakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha rencananya dibangun bulan depan. Sebagai pemenang lelang setelah menyisihkan dua konsesium pesaingnya. Konsesium PT Pembangunan Perumahan Tbk. Kini berancang-ancang membangun proyek kereta api pertama yang dibangun swasta di tanah Celebes.		

► PROYEK PERKERETAAPIAN

Jejak Perdana Swasta di Tanah Celebes

Pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi segmen Makassar—Parepare sepanjang 13,90 kilometer yang merupakan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha rencananya dibangun bulan depan.

► Konsorsium juga menjajaki pinjaman dari dua bank swasta yang tertarik mendanai 70% kebutuhan investasi.

Indonesia juga akan melakukan perawatan di jalur kereta api sepanjang 142 kilometer.

Lantas bagaimana dengan pendanaan proyek?

Menurut Agus, konsorsium juga menjajaki pinjaman dari dua bank swasta yang tertarik mendanai 70% kebutuhan investasi di proyek tersebut.

"Kami akan mulai dulu *groundbreaking* pada April 2019 dan 4 bulan dari sekarang kami harapkan bisa *financial close*," ujarnya kepada *Bisnis* di Jakarta, pekan lalu.

Dari sisi penjaminan, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bakal menandatangani perjanjian dengan PT Celebes Railway Indonesia pada bulan ini.

Direktur Utama PII Armand Heemawan mengatakan bahwa proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi di lintas Makassar—Parepare merupakan salah satu proyek kerja sama yang sudah disiapkan sejak tahun lalu.

PII, katanya, memberi penjaminan maksimal Rp1 triliun terhadap risiko yang timbul dari pihak pemerintah.

Secara umum, PII bisa memberi penjaminan berbagai jenis risiko, mulai dari risiko keterlambatan konstruksi, risiko keterlambatan pembayaran, risiko politik, hingga risiko terminasi.

"[Penjaminan jalur kereta api] Makassar—Parepare signing Maret, maksimal Rp1 triliun," ujarnya kepada *Bisnis*, Selasa (5/3). ¹⁰

Rizki Maulana
rizki.maulana@bisnis.co.id

Sebagai pemenang lelang setelah menyisihkan dua konsesium pesaingnya, konsorsium PT Pembangunan Perumahan Tbk, kini berancang-ancang membangun proyek kereta api pertama yang dibangun swasta di tanah Celebes.

Badan usaha lain yang tergabung dengan konsorsium PTTP adalah PT Bumi Karsa, PT China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT Iroda Mitra. Mereka membentuk perusahaan patungan yang diberi nama PT Celebes Railway Indonesia. Perusahaan itu menjadi pemenang lelang dengan mengajukan penawaran nilai investasi Rp1 triliun dan penawaran besaran pembayaran ketersediaan layanan sebesar Rp246,74 miliar. Lelang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan meskipun sempat diwarnai dengan sanggahan dari peserta lelang.

Direktur Keuangan PTTP Agus Purbiyanto mengatakan selain membangun rel kereta sepanjang 13,90 kilometer, konsorsium Celebes Railway

Gagasan membangun kereta api di Pulau Sulawesi sudah dilontarkan jauh-jauh hari. Kementerian Perhubungan sudah mencanangkan pembangunan jalur sepur Trans-Sulawesi dalam Rencana Induk Perkeretaapian 2030. Sebetulnya, jaringan kereta api di Sulawesi sempat beroperasi pada 1922–1930 di lintas Makassar–Takalar. Dalam rencana induk yang disusun pada 2011, pemerintah berencana membangun jalur kereta api sepanjang 500 kilometer, terdiri atas dua jalur, yakni Makassar–Parepare, Makassar–Takalar–Bulukumba, Manado–Bitung, dan Manado–Gorontalo. Adapun, jalur kereta api Makassar–Parepare bakal menjadi tumpuan angkutan penumpang dan angkutan barang.



Profil Jalur Kereta Api Trans-Sulawesi Segmen Makassar–Parepare

Makassar–Parepare

Panjang
13,90
km

- Pemenang lelang: PT Celebes Railway Indonesia
- Konsorsium badan usaha: PT PP Tbk., PT Bumi Karsa, PT China Communication Construction Engineering Indonesia, dan PT Iroda Mitra.
- Nilai Penawaran: Rp1 triliun
- Penjamin proyek: PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
- Rencana pemancangan tiang perdana: April 2019

Sumber: PT PP Tbk, Kementerian, dibalai

BISNIS/RAO1110 ENO



Judul	Sirkuit Balap Motor Perlu Waktu Panjang	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Rencana pembangunan sirkuit jalan raya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC bekerja sama dengan Vinci Construction Grand Projects masih menjadi euphoria untuk meningkatkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok.		

► KEK MANDALIKA

Sirkuit Balap Motor Perlu Waktu Panjang

Bisnis, MATARAM — Rencana pembangunan sirkuit jalan raya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC bekerja sama dengan Vinci Construction Grand Projects masih menjadi euphoria untuk meningkatkan pariwisata di Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok.

Proyek ini direncanakan selesai pada 2020 dengan nilai investasi sebesar US\$40 juta. Kompleks sirkuit Mandalika digadang merupakan sirkuit jalan raya pertama sepanjang 4,32 kilometer yang akan memanjakan para wisatawan dan penonton dengan pemandangan bukit dan pantai.

Sebagai sirkuit jalan raya, proyek ini akan dibangun dengan standar Federation Internationale de Motorcyclisme (FIM) dan Federation Internationale de l'Automobile (FIA) untuk kelayakan penyelenggaraan kejuaraan dunia balap motor.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Achris Sarwani mengatakan, kondisi Mandalika dengan rencana pembangunan sirkuit saat ini diibaratkan sebuah aset yang harus dikelola dengan cermat. Menurutnya, pembangunan kawasan tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan sirkuit bertaraf internasional.

"Sirkuit ini hanya salah satu A dalam 3A 2P dalam pariwisata, yaitu atraksi. Tentunya pembangunan sirkuit ini tentunya harus didukung dengan *amenities, accessibility, promotion* dan *people* yang sesuai sehingga benar-benar bisa dirasakan manfaatnya," ujar Achris.

Jika terwujud, sirkuit MotoGP di Mandalika bisa menampung ratusan ribu penonton. Kapasitas kursi penonton di stand utama sirkuit Mandalika rencananya bisa mengakomodasi 93.200 penonton. Kemudian, akan ada 138.700 area tanpa tempat duduk

dan *hospitality suites* yang mampu menampung 7.700 penonton.

Kendati demikian, Achris menyebutkan bahwa diperlukan sumber daya manusia yang siap untuk menerima kehadiran kawasan wisata tersebut.

"Semua perlu standar, jangan sampai ketika semua sudah siap, SDM-nya yang tidak siap dan tidak mampu menerima. Jadi semua ini harus disiapkan secara beriringan. Jangan memaksakan kalau memang orang lokal belum siap, cari SDM dari daerah lain yang siap. Karena ini bukan hanya proyek NTB, tetapi ini proyek Indonesia," ujarnya.

Sejauh ini, nilai komitmen investasi yang masuk ke KEK Mandalika sudah sebesar Rp22,68 triliun. Ratusan ribu penonton yang datang dipercaya mampu menggairahkan aktivitas ekonomi, terutama pariwisata, di Lombok Tengah.

Menurut catatan *Bisnis*, Wakil Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri pernah mengatakan bahwa pariwisata di Lombok Tengah sebenarnya sudah berkembang beberapa tahun terakhir.

Hal ini tercermin dari pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata yang meningkat dari Rp35 miliar pada 2-3 tahun lalu menjadi Rp200 miliar.

Dikutip dari laman resminya, ITDC menerangkan 5,5% wilayah Mandalika akan dibangun untuk pengembangan kawasan komersial. Kemudian, sejumlah infrastruktur dasar seperti penyaring air, sel surya, tempat pengolahan air bersih dan limbah, serta fasilitas pendukung aksesibilitas juga bakal disediakan di kawasan tersebut.

Pembangunan sirkuit balap tentu memerlukan biaya yang tak sedikit. Ditambah dengan biaya untuk memiliki lisensi MotoGP, dana yang diperlukan pastinya sangat besar.

Diharapkan, dampak positif dengan adanya sirkuit balap motor itu bisa dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat. (16)

Judul	Bandung Minta Rp256 Miliar	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Pemerintah Kota Bandung meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi anggaran untuk pembangunan Sembilan infrastruktur di Kota Bandung. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana optimis, usulan kebutuhan infrastruktur itu akan terealisasi mengingat nilai permohonan anggaran Kota Bandung relative lebih kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat dengan total pengajuan anggaran Rp256,14 miliar		

► INFRASTRUKTUR KOTA

Bandung Minta Rp256 Miliar

Bisnis, BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberi anggaran untuk pembangunan sembilan infrastruktur di Kota Bandung.

Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana optimis, usulan kebutuhan infrastruktur itu akan terealisasi mengingat nilai permohonan anggaran Kota Bandung relatif lebih kecil dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Jawa Barat dengan total pengajuan anggaran Rp256,14 miliar.

"Dengan permohonan anggaran yang relatif lebih kecil ini, saya harap semua usulan dapat segera direalisasikan," ujarnya di Bandung, Selasa (5/3).

Pihaknya mencatat angka Rp256 miliar tersebut akan digunakan untuk pembangunan tiga jembatan layang dan satu terowongan di jalan Dewi Sartika.

Tidak hanya itu, Pemkot Bandung juga bakal membangun kolam retensi Sinaraga

2, Rusunawa Rancacili, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), kantor inspektorat, masjid dan Alun-alun Cibiru.

"Selain itu, kami membangun trotoar sebanyak di 7 titik serta menata drainase di kawasan Kiarcondong," katanya.

Menurutnya, sembilan proyek tersebut sebagai usulan kebutuhan infrastruktur Kota Bandung yang dianggap mendesak dan harus segera dieksekusi pembangunannya pada tahun ini. "Karena DED [*detail engineering design*]-nya rata-rata sudah selesai, dan tinggal memasuki tahap pembangunan konstruksi. Saya harap ini secepatnya bisa dieksekusi," paparnya.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya masih mengajak bupati/wali kota untuk mensinkronkan, sekaligus mengoptimalkan arah pembangunan. Hal ini termasuk pembangunan infrastruktur, baik yang tercakup dalam proyek strategis nasional ataupun provinsi.

Dia meminta agar bupati/wali kota bisa menindaklanjuti program pembangunan yang telah berjalan dan yang akan direncanakan. Selain itu, mengakomodasi hal-hal apa saja yang diinginkan dan dibutuhkan dalam pembangunan yang dituju.

"Kami tidak mau lagi arah pembangunan kurang sinkron," ujarnya.

Ridwan memastikan Provinsi Jawa Barat telah berkomitmen bahwa pembangunan tidak harus hanya lewat pintu APBD. Apabila APBD tidak mencukupi, dirinya siap membantu bupati/wali kota untuk melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat.

"Saya siap juga membantu cari kerja sama dengan swasta, bisa ke Bank BJB pakai kredit infrastruktur daerah [Indah], bisa ikut ke luar negeri melobi lembaga donor hibah, bisa CSR, dana umat, dan lain-lain," katanya. (k34/k57)

Judul	Perusda MBS Jadi Operator Pelaksana	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan akan diresmikan pada 14 Maret 2019 dan operator pelaksanaan akan diserahkan kepada perusahaan daerah, PT Melati Bhakti Satya atau MBS.		

► KEK MALOY

Perusda MBS Jadi Operator Pelaksana

Bisnis, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan, Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan akan diresmikan pada 14 Maret 2019 dan operator pelaksanaan akan diserahkan kepada perusahaan daerah, PT Melati Bhakti Satya atau MBS.

Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Isran Noor menyatakan, peresmian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan akan dilakukan bersamaan dengan semua KEK di seluruh Indonesia pada 14 Maret 2019. Peresmian akan berlokasi di Bitung, Sulawesi Utara langsung oleh Presiden Joko Widodo.

"Kita perintahkan nanti operator pelaksana PT MBS. Dia nanti kerja sama dengan pihak swasta, dan kebijakan kita akan memberikan keringanan kepada semua investor. Kalau perlu gratis sewa lahan, setelah produksi baru kita pungut," kata Isran di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (5/3).

Isran mengaku, tidak ada kendala lagi dalam peresmian KEK Maloy yang tinggal menghitung hari. Dia menilai bahwa sejumlah kritik atas ketidaksiapan KEK Maloy adalah upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan perusda.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur Taufik Fauzi mengatakan, saat ini masih ada beberapa rangkaian proses yang sedang dikerjakan, salah satunya penyusunan Raperda KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) yang menjadi kewenangan DPRD.

Beberapa masalah lain terkait dengan pembebasan lahan yang belum menemukan jalan tengah dengan masyarakat. Taufik menyatakan, kebutuhan lahan 5 hektare untuk air baku baru bisa dibebaskan oleh pemprov seluas 2 hektare. Hal ini lantaran 3 hektare itu masih dalam proses negosiasi dengan masyarakat pemilik lahan.

"Anggaran yang ada hanya cukup untuk 2 hektare. Sekarang masih sisa dan ada kendala dengan *appraisal*.

Sudah ada delapan orang yang selesai dibayarkan ada lima masih sisa tiga lagi," ujar Taufik.

Ketua Pansus Raperda Maloy Rita Artaty Barito mengaku pesimistis untuk meresmikan KEK Maloy pada 14 Maret 2019, karena masih banyak permasalahan teknis yang belum rampung. Dia menyatakan, untuk penyelesaian lahan saja ditargetkan paling lambat sudah harus selesai pada 30 Maret 2019.

"Lahan antara pemprov dan warga itu harus segera diselesaikan," jelas Rita.

Dia mengaku, akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Menurut Rita, permasalahan itu timbul karena Pemprov hanya membutuhkan sebagian dari lahan, sementara warga menawarkan semua lahannya untuk dijual dan dibayarkan sesuai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku.

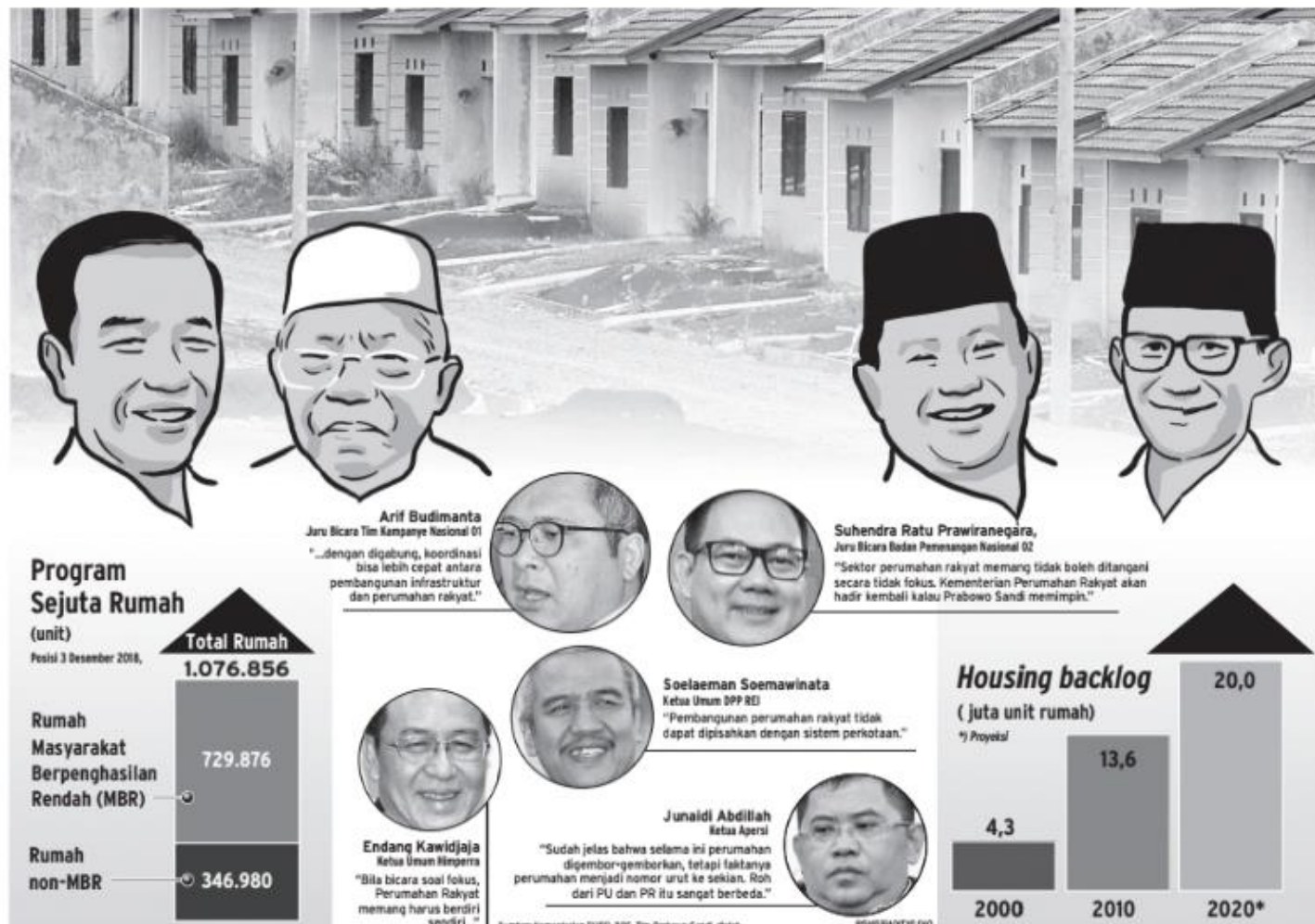
Direktur Utama PT MBS Agus Dwitarto mengungkapkan, sudah siap menjadi operator pelaksana KEK Maloy seturut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Iya. Kita umumkan siap beroperasi nanti kita umumkan. Siap beroperasi, fasilitasnya ini. Kalau ada yang berminat nanti tinggal datang dan melihat," jelas Agus.

Terkait dengan Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK) ini telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 500/K. 554 Tahun 2015. Adapun untuk administrator KEK MBTK adalah berlandaskan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 552.2/1341/EK dan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 510.4/419/2015.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur Muhamad Nur menyatakan, KEK Maloy akan menjadi alternatif baru bagi penunjang ekonomi di Bumi Etam. Nur menyatakan bahwa Kaltim memiliki potensi yang besar untuk industri pengolahan atau penghiliran non migas maupun produk pertanian seperti CPO. (Gloria FX Lawi)

Judul	PUPR, Pisah atau Tetap Digabung?	Tanggal	Rabu, 06 Maret 2019
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Wacana penggabungan atau pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini berembus semakin kencang, termasuk di kedua kubu calon presiden dan wakil presiden. Dan kedua calon tersebut siap menelurkan strategis khusus seandainya terpilih mengemban amanat rakyat dalam 5 tahun pemerintah.		



PUPR, Dipisah atau Tetap Digabung?

Wacana penggabungan atau pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kini berembus semakin kencang, termasuk di kedua kubu calon presiden dan wakil presiden.

Mutiara Nabila & Putri Zahra Salsabila
redaksi@bisnis.com

Dua kubu calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin & Prabowo-Sandi, pun siap menelurkan strategi khusus seandainya terpilih mengemban amanat rakyat dalam 5 tahun pemerintahan.

Arif Budimanta, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 01 Jokowi-Ma'ruf mengatakan, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selama ini sudah cukup efektif.

Salah satu efektivitas penggabungan tersebut adalah koordinasi yang lebih cepat antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat.

"PUPR tidak pernah akan dihapus. Perumahan Rakyat tetap ada, walaupun dilebur dengan Pekerjaan Umum. [Adanya] Kementerian PUPR ini menunjukkan bahwa perumahan rakyat juga masih jadi prioritas.

Menurut saya, dengan digabung koordinasi bisa lebih cepat antara pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat," ujar Arif dalam Rencan Nasional Mengukur Perlu-nya Kementerian Perumahan Rakyat pada Kabinet 2019-2024, Selasa (5/3).

Alih-alih fokus pada pemisahan PU dan PR, kubu Jokowi & Ma'ruf justru fokus pada target memaksimalkan program perumahan rakyat.

Pihak Jokowi-Ma'ruf menyebutkan sejauh ini, pemerintahan Jokowi-JK telah berhasil menyediakan rumah

bagi rakyat melalui program sejuta rumah.

Aka kembali terpilih, program ini akan dilanjutkan dengan target lima juta rumah selama 5 tahun.

Sebaliknya, kubu Prabowo-Sandi menilai penggabungan PU dan PR saat ini membuat kinerja pemerintah dalam menangani sektor perumahan rakyat tidak fokus.

Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara Badan Pemangan Nasional Prabowo-Sandi, mengungkapkan jika kubunya terpilih, Kementerian Perumahan Rakyat akan berdiri sendiri.

"Kementerian PUPR saat ini sudah melaksanakan tupoksinya, hanya sektor perumahan rakyat memang tidak boleh ditangani secara tidak fokus, harus lebih fokus. Untuk itu, kesimpulan dari tim kami, bahwa Kementerian Perumahan Rakyat akan hadir kembali kalau Prabowo-Sandi nanti memimpin," ujarnya.

Kementerian Perumahan Rakyat, menurut Suhendra, tidak bisa digabungkan dengan Pekerjaan Umum karena pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah dua hal yang berbeda, kendati saling terkait.

Dia menilai, bergabungnya Kementerian PU dengan PR adalah 'klamat kecil' bagi sektor perumahan rakyat karena tidak mampu menyelesaikan problem backlog perumahan.

"Pada 2020, backlog bisa mencapai 20 juta rumah, kalau penanganannya tidak fokus," tegasnya.

DILEMA PENGEMBANG

Di kalangan pengembang, isu tersebut juga masih menjadi dilema. Walaupun PUPR sukses melaksanakan

beberapa proyek, penggabungan PUPR dianggap mengganggu konsentrasi pemerintah terhadap pembangunan perumahan rakyat.

Ketua Umum Himpuan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengatakan bila bicara soal fokus, Perumahan Rakyat memang harus berdiri sendiri.

Kendati demikian, penggabungan PU dan PR selama ini telah berdampak positif terhadap birokrasi yang jauh lebih ringkas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realstat Indonesia (DPP RET) Soelaeman Soemawinata menilai

persoalan perumahan rakyat memiliki sifat yang sangat holistik.

Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,2% per tahun, itu berarti akan ada tambahan 3 juta orang setiap tahun. Selain itu, akan

ada 500-800 keluarga baru, sehingga pemerintah perlu lebih fokus terhadap pembangunan perumahan rakyat.

Walaupun demikian, Soelaeman mengatakan bahwa pembangunan perumahan rakyat tidak dapat dipisahkan dengan sistem perkotaan.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia (Aperpi) Junaidi Abdillah mengatakan, PUPR perlu dipisah karena kedua kementerian ini memiliki cakupan konsentrasi yang berbeda.

"Sudah jelas selama ini perumahan digembar-gemborkan, tetapi faktanya perumahan menjadi nomor urut kesekian. Roh dari PU dan PR itu sangat berbeda," ujarnya. ■

Anggaran Terbatas, Pengembang Waswas

Bisnis, JAKARTA - Alokasi anggaran untuk penyediaan perumahan yang diturunkan menjadi sekitar 170.000 unit pada tahun ini membuat pengembang cemas karena akan berpengaruh pada permintaan.

Ketua umum Himpuan Pengembang Perumahan dan Permukiman Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja mengungkapkan kondisi anggaran tahun ini cukup mengkhawatirkan. Dari skema Subsidi Selisih Bunga (SSB) hanya 100.000 unit dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun lalu 68.000 unit, sedangkan dari program baru Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 14.000 unit.

"Padahal, tahun lalu ada total sekitar 255.000-260.000 unit, dari anggaran FLPP dan SSB yang tersedia 295.000 unit. Ini berarti ada penurunan," jelasnya dalam acara Rencan Nasional, Selasa (5/3).

Endang mengatakan pihaknya telah menyampaikan kondisi ini kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan jumlah anggaran tersebut, diperkirakan seluruh unit bantuan habis pada Juli.

"Dana sekarang hanya bisa menyediakan sampai 168.000 unit saja," lanjutnya.

Endang berharap pemerintah bisa mengembalikan alokasi anggaran atau bahkan memperbanyak anggaran pembangunan lewat ketiga skema tersebut. Pasalnya, cicilan dengan skema untuk SSB saja sangat ringan, hanya Rp4 juta per tahun sehingga peminatnya dari masyarakat berpenghasilan rendah tinggi dan akan terus bertambah.

"Kalau tidak ditambah, Juli atau Agustus [anggaran] habis. Kalau habis, sementara yang beli akan tetap ada, cuma pasti karena enggak ada subsidi, jadi [harganya] agak mahal. Pasti terjadi drop di demand, kalau drop target pasti enggak tercapai. Kasihan pengembang yang sudah bangun, rakyat sudah cicil uang muka, rumah sudah jadi, tapi enggak bisa akad." (Mutia Nabila)